



## KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

### **KETERANGAN PERS**

**Nomor: 40/HM.00/KH/VI/2023**

#### **Komnas HAM bersama KPU, Bawaslu, serta Partai Politik Deklarasikan Pemilu dan Pilkada 2024 Ramah HAM**

Pemilu menjadi sarana untuk mewujudkan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan (*right to take part in government*), hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and to be elected*), serta hak untuk memperoleh kesetaraan akses dalam pelayanan publik (*right to equal access to public service*).

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan untuk ikut serta dalam Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil (LUBER JURDIL), dan tanpa diskriminasi.

Komnas HAM menilai bahwa Pemilu tidak hanya sekedar persoalan legitimasi kekuasaan politik atau syarat negara demokrasi saja, tetapi lebih dari pada itu, Pemilu merupakan mekanisme penting dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia dan pengejawantahan pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Komnas HAM telah berdiri dan bergerak dalam penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia selama 30 tahun. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiroy menyebutkan bahwa Komnas HAM RI berkomitmen untuk terus aktif berkontribusi positif dalam penegakan HAM, termasuk upaya-upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara, salah satunya melalui pelaksanaan Deklarasi Pemilu Ramah HAM bersama para pemangku kepentingan.

Deklarasi Pemilu Ramah HAM hari ini adalah salah satu langkah responsif Komnas HAM untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak kepemiluan setiap warga negara, terutama bagi kelompok marginal-rentan. Komnas HAM mengajak berbagai mitra Komnas HAM untuk bersama-sama mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang tidak hanya sekedar LUBER dan JURDIL saja, tetapi juga mampu menopang berbagai aspek pemenuhan HAM bagi setiap warga negara, terutama kelompok marginal-rentan.

Komnas HAM bersama KPU, Bawaslu, serta Partai Politik menyuarakan 4 (empat) point Deklarasi Pemilu Ramah HAM, yaitu:

1. Menjamin pemenuhan Hak Pilih Kelompok Marginal-Rentan.
2. Menjamin Pemilu Akses yang inklusif terhadap Kelompok Marginal-Rentan.
3. Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang bebas diskriminasi, nirkekerasan dan adil.
4. Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang bebas hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian.

Ke empat point dalam Deklarasi Pemilu Ramah HAM yang telah disampaikan dan tanda tangani ini akan menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang bebas (*free*) dan berkeadilan (*fair*) serta menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia; mendorong penyelenggaraan Pemilu yang tidak manipulatif (*genuine*) dan mencerminkan kenyataan pemilihan yang sesungguhnya (*real choice*) dan buka hasil manipulasi suara; serta mendorong upaya penanganan dan penghapusan terhadap praktik diskriminasi terhadap kelompok marginal rentan.

“Sebagaimana semangat 30 tahun Komnas HAM untuk “Mengokohkan Keadaban HAM di Indonesia,” hal tersebut juga menjadi semangat kita bersama untuk bergerak dan berkolaborasi dalam membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih humanis”, tutur Atnike dalam sambutannya.

Hadir menandatangani Deklarasi Pemilu Ramah HAM Ketua Komnas HAM RI, Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI sekaligus Ketua Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Ketua Bawaslu, Ketua KPU RI, Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (P3), Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Ketua DPP Partai Garuda, Perwakilan Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Perindo, Partai Nasdem, Partai Gelora.

Selain itu, hadir Deputy Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN dan Staf Ahli Bidang Politik Hukum dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) RI, Wakil Ketua Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI, Polri, Kementerian Dalam Negeri, serta NGO/CSO dan Organisasi Keagamaan.

**Jakarta, 11 Juni 2023**  
**Ketua Komnas HAM Republik Indonesia,**

**Atnike Nova Sigiro**